



## Analisis *Social Capital* Pada Kemenangan Calon Bupati Independen Dalam Pilkada Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024

Amri Wahid Hidayat<sup>1</sup>, Yeni Sri Lestari<sup>2</sup>, Muliawati<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Sosiologi, Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia

\*Corresponding author

E-mail addresses: : [amriwahidayat@utu.ac.id](mailto:amriwahidayat@utu.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received May 31, 2025

Revised June 11, 2025

Accepted June 30, 2025

Available online July 12, 2025

#### Kata Kunci:

Modal sosial, Independen, Pemilukada

#### Keywords:

*Social capital, Independent, Regional Head Election*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

### ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia, khususnya di Aceh, telah mengalami perubahan yang signifikan dengan munculnya calon independen yang tidak berafiliasi dengan partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi calon independen pada Pemilukada Aceh Besar 2024, dengan fokus pada kemenangan pasangan calon independen, Muharram Idris dan Syukri, yang berhasil meraup 33,8% suara, dengan menggunakan teori modal sosial untuk analisis. Kemenangan ini memunculkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mereka di tengah persaingan ketat dari para calon yang mewakili partai politik besar. Melalui pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari sumber literatur dan media. Temuan penelitian menunjukkan bahwa modal sosial, yang meliputi jaringan, kepercayaan, dan kerja sama, memegang peranan penting dalam mendukung calon independen. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana kemunculan calon independen

mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pencalonan yang diajukan oleh partai politik, sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses demokrasi. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang dinamika Pemilukada di Aceh dan kontribusi calon independen terhadap pengembangan demokrasi lokal.

### ABSTRACT

*The Regional Head Election (Pemilukada) in Indonesia, particularly in Aceh, has undergone significant changes with the emergence of independent candidates who are not affiliated with political parties. This study aims to analyze the existence of independent candidates in the Aceh Besar Pemilukada of 2024, focusing on the victory of the independent candidate pair, Muharram Idris and Syukri, who successfully garnered 33.8% of the votes, using social capital theory for analysis. This victory raises questions about the factors influencing their success amid fierce competition from candidates representing major political parties. Through a qualitative approach and case study method, this research collects primary data through interviews and observations, as well as secondary data from literature and media sources. The findings indicate that social capital, which includes networks, trust, and cooperation, plays a crucial role in supporting independent candidates. This study also highlights how the emergence of independent candidates reflects public dissatisfaction with nominations put forth by political parties, while providing an opportunity for the community to engage directly in the democratic process. These findings are expected to offer new insights into the dynamics of Pemilukada in Aceh and the contributions of independent candidates to the development of local democracy.*

## **1. PENDAHULUAN**

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) adalah salah satu bentuk demokrasi langsung yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Di Indonesia, Pemilukada telah menjadi bagian penting dari sistem demokrasi sejak reformasi 1998. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat perubahan signifikan dalam dinamika Pemilukada, yaitu munculnya calon independen yang tidak berasal dari partai politik. Demokrasi selama ini hanya dilihat sebagai proses pemilihan secara langsung atau pemilu untuk mengisi jabatan politik. Sebagaimana pendapat Syamsudin Haris yang menjelaskan bahwa pemilihan umum (pemilu) adalah cara terbaik yang dilakukan untuk memilih pejabat publik (Agus, 2013). Pengisian pejabat publik dengan proses pemilu saat ini dinilai sebagai sistem yang paling ideal dan paling fair sebagai wujud dari demokrasi yang ada di Indonesia. Dengan partisipasi masyarakat dalam pemilukada dapat menjadi pengaruh kuat peningkatan demokrasi ditingkat lokal atau daerah.

Aceh memiliki sejarah panjang dalam perjuangan kemerdekaan dan otonomi daerah. Pada tahun 1959, Aceh diberikan status sebagai Daerah Istimewa (DI) oleh pemerintah Indonesia. Status ini memberikan Aceh hak untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan, pendidikan, dan agama. Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki otonomi khusus, juga mengalami perubahan dalam dinamika Pemilukada. Kekhususan Aceh dalam Pemilukada ini tertuang Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan Aceh hak untuk mengatur Pilkada sendiri, termasuk dalam hal pencalonan, pemilihan, dan pengawasan.

Dalam Pilkada Aceh, calon independen dapat maju sebagai calon tanpa harus berasal dari partai politik. Hal ini berbeda dengan daerah lain di Indonesia, di mana calon harus berasal dari partai politik yang memiliki dukungan minimal 20% dari total suara dalam Pemilu sebelumnya. Keistimewaan calon independen dalam Pilkada Aceh adalah sebagai berikut: (1) Pencalonan, calon independen dapat maju sebagai calon tanpa harus berasal dari partai politik. (2) Pengawasan, calon independen dapat diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Aceh dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. (3) Pemilihan, calon independen dapat dipilih oleh masyarakat Aceh tanpa harus memiliki dukungan dari partai politik.

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Aceh Besar tahun 2024 telah menjadi perhatian banyak pihak, terutama karena kemenangan calon independen, Muharram Idris dan Syukri, yang tidak berasal dari partai politik. Kemenangan yang diraih pasangan yang berasal dari calon independen ini bukanlah hal dapat diprediksi, karena lawan-lawan politiknya dalam pemilukada ini adalah bukan calon sembarangan, diantaranya Maward Ali sebagai calon incumbent, Mukhlis Basyah yang merupakan mantan bupati Aceh besar dan diusung oleh partai lokal terbesar di Aceh, yaitu partai Aceh dan yang terakhir adalah Musanif yang merupakan mantan anggota DPR RI. Kemenangan ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan calon independen ini.

Pemilukada Aceh Besar tahun 2024 diadakan pada tanggal 27 November 2024, dengan empat pasangan calon yang bersaing untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar. Pasangan calon independen, Muharram Idris dan Syukri, yang tidak berasal dari partai politik, berhasil memenangkan Pemilukada Tahun 2024 dengan perolehan 73.673 suara atau 33,8 persen. Pada Pemilukada Aceh Besar tahun

2024, diharapkan akan terjadi perubahan signifikan dalam peta politik daerah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang eksistensi calon independen dalam Pemilu di Aceh Besar tahun 2024. Kemunculan pasangan calon independent adalah perwujudan dari rasa kecewa masyarakat terhadap pencalonan yang diusung oleh partai politik dan merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pemilu (Pratikno, 2007).

Menurut Arbi Sanit, calon independent adalah tokoh masyarakat yang mengikuti kontestasi pemilihan umum kepala daerah melalui jalur perseorangan yang menggunakan mekanisme kemasyarakatan dengan kemampuan pribadi. Namun dinegaralain, calon independen biasanya lahir untuk memperjuangkan kaum minoritas, meskipun tingkat terpilihnya sukar dalam pemilu (Sanit, 2009). Disisilain, jika merujuk pada UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, calon independent secara tegas dinyatakan: "untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga Negara yang memenuhi persyaratan". Dengan demikian, calon independen diharuskan memiliki modal kemampuan pribadi dalam mengikuti kontestasi pemilu karena calon independent tidak memiliki dukungan politik dari partai maupun koalisi partai politik yang dapat mendukung segala kebutuhan selama proses pemilu.

Sumber daya sosial yang dikenal sebagai modal sosial dapat diinvestasikan untuk menghasilkan sumber daya baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, modal sosial dianggap sebagai komponen penting dalam mencapai kemajuan bersama dengan menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, kepercayaan satu sama lain, dan saling menguntungkan. Menurut Fukuyama (1999), modal sosial memainkan peran yang sangat penting dalam menjalankan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern. Modal sosial adalah syarat yang harus dipenuhi untuk stabilitas demokrasi, pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan manusia. Modal sosial yang lemah akan melemahkan semangat gotong royong, memperparah kemiskinan, meningkatkan pengangguran, meningkatkan kriminalitas, dan menghalangi setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk (Fukuyama, 1999).

Teori modal sosial paling jelas menjelaskan tentang "hubungan". Orang mampu bekerja sama untuk mencapai banyak hal yang tidak dapat mereka lakukan sendiri atau yang dapat mereka lakukan dengan susah payah. Ini dapat dicapai dengan membangun hubungan dengan sesama dan menjaganya terus berlangsung sepanjang waktu. Orang berhubungan melalui jaringan dan cenderung memiliki nilai yang sama dengan orang lain dalam jaringan. Jika jaringan berfungsi sebagai sumber daya, jaringan dapat dianggap sebagai modal (Field, 2016).

Robert Putnam mengembangkan teori sosial kapital dalam bukunya "*Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*" (2000), yang menjelaskan bahwa sosial kapital adalah jaringan sosial yang dapat membantu individu atau kelompok masyarakat mencapai tujuan tertentu. Teori ini juga menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti kepercayaan, kerja sama, dan jaringan sosial dapat memengaruhi sosial kapital (Khairussalam et al., 2023).

Calon independen selayaknya sudah memiliki modal sosial (*social capital*) yang sudah dibangun sejak jauh hari., bukan hanya modal citra yang baik dalam

masyarakat melainkan bentuk modal sosial berupa kemampuan untuk bekerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Modal sosial disini berupa elemen kohesifitas, altruisme, kepercayaan, jaringan dan kolaborasi sosial. Banyak ahli yang berpendapat bahwa modal sosial merupakan basis utama yang dibutuhkan agar terciptanya demokrasi dalam masyarakat. Robert Putnam, Sosiologi Italia telah mengkaji tentang bagaimana perwujudan demokrasi ditingkat local dapat berjalan dengan modal sosial yang bekerja dan mengacu pada hubungan antara individu dengan masyarakat, jaringan sosial, kepercayaan (*trust*) serta norma yang saling mendukung dan membutuhkan sebagai satu kesatuan penting untuk membangun fondasi demokrasi di aras masyarakat lokal (Putnam, 1993).

Modal sosial dewasa ini telah menjadi sumber daya sosial dan merupakan bentuk investasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama didalam suatu kelompok dengan kerjasama yang baik. Dengan modal sosial yang terjaga dengan baik juga dapat menjadi investasi untuk memperoleh sumber daya baru. Sumber daya baru disini dapat diartikan sebagai jaringan yang dapat bekerjasama guna mencapai suatu tujuan tertentu baik itu kelompok keluarga sebagai institusi terkecil, organisasi, dan semua hal lainnya yang mengarah pada Kerjasama (Solihah, 2019). Seperti kajian yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu terdapat seorang calon bupati yang berasal dari perseorangan atau independent di Kabupaten Aceh Besar yang memiliki modal sosial berdasarkan latarbelakangnya sebagai mantan kombatan GAM dan mantan panglima GAM wilayah Aceh Besar. Sehingga menarik untuk diteliti lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana modal sosial yang dimiliki oleh Syeh Muharam hingga dapat terpilih menjadi Bupati Aceh Besar.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln dalam Creswell (2014) merupakan penelitian yang bersifat naturalistik, sehingga peneliti dapat menganalisis kasus yang terjadi berdasarkan pandangan yang diberikan oleh masyarakat. Melalui penelitian kualitatif akan membantu peneliti dalam menganalisis fenomena terpilihnya Muharram sebagai Bupati Aceh Besar pada pemilukada yang berasal dari calon independen. Adapun Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dengan cara wawancara dan observasi. Analisis data yang dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2003). Dalam proses penentuan informan, peneliti menggunakan cara purposive sampling, yang mana peneliti akan mengambil sampel sesuai dengan kriteria tertentu yang dianggap memahami fenomena yang sedang diteliti. Menurut Creswell (2018) Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih narasumber berdasarkan pengalaman yang dialami oleh narasumber. Informan yang dipilih antara lain adalah masyarakat Aceh Besar, Tokoh masyarakat, Tim Pemenangan Muharam dan Tim Pemenangan pasangan calon lainnya.

Data sekunder pada penelitian ini berasal dari buku-buku dan publikasi ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Selain itu artikel berita dari media online, dokumentasi kegiatan Muharam ketika masa pemilukada yang terpublikasi di Instagram, dan jurnal-jurnal yang berfokus pada calon independent

juga peneliti jadikan data sekunder dalam penelitian ini. Data-data tersebut memberikan informasi teoritis dan konstektual yang memperkuat peneliti dalam menganalisis fenomena terpilihnya calon independent dalam pemilukada di Aceh Besar. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara melibatkan berbagai pihak yang memiliki pengetahuan dalam fokus penelitian yang peneliti lakukan. Wawancara selain sebagai pelengkap, juga memberikan wawasan langsung kepada peneliti tentang bagaimana calon independent dapat memenangkan pemilukada Aceh Besar, strategi yang digunakan dalam menaikkan elektabilitas, pandangan serta harapan masyarakat Aceh Besar kepada Bupati terpilih, yang selanjutnya memperkuat argument penelitian tentang keberhasilan Muharam mengalahkan calon-calon Bupati Aceh Besar lainnya yang didukung penuh oleh partai politik dan koalisinya.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***Penciptaan Jaringan Sosial sebagai modal awal pencalonan Syekh Muharam sebagai Calon Bupati Aceh Besar***

Jaringan sosial merupakan salah satu sistem saluran komunikasi untuk melindungi dan mempromosikan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal yang dimiliki seseorang menjadi cerminan dari kepercayaan bersama yang timbul didalam masyarakat. Jaringan sosial ini berupa jaringan yang saling berkaitan erat antara satu sama lainnya seperti sebuah keluarga inti yang bersifat ekstensif sebagai suatu organisasi volunter. Dalam membangun sebuah jaringan, diperlukan keinginan seseorang untuk bergabung dalam sebuah jaringan yang disebabkan oleh adanya nilai bersama (Thomas Santoso, 2020).

Pilkada Aceh Besar Tahun 2024, GAM sebagai sebuah organisasi sudah tidak ada lagi dan telah bertransformasi menjadi lembaga Komisi Peralihan Aceh (KPA). Dengan demikian, baik organisasi GAM maupun KPA tidak secara langsung terlibat dalam kampanye atau pencalonan pada pilkada Aceh Besar tahun 2024. Namun, para anggota mantan kombatan GAM masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat Aceh. Para tokoh ataupun elite kombatan GAM masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat Aceh, terutama di kalangan masyarakat yang pro-kemerdekaan. Pemilih yang pro-GAM maupun para mantan kombatan GAM yang tergabung dalam KPA akan lebih cenderung untuk memilih pasangan calon yang dianggap memiliki hubungan dengan GAM atau yang memiliki visi yang sejalan dengan GAM.

Pasangan calon bupati Aceh Besar independent Muharram Idris-Syukri, memiliki hubungan yang dekat dengan anggota KPA. Muharram sebagai salah-satu tokoh kombatan GAM Aceh Besar, dengan latar belakang yang dimiliki telah memberikan nilai lebih dalam proses penciptaan jaringan. Jaringan yang tercipta sudah terjadi sejak masa konflik antara sesama kombatan GAM di wilayah Aceh Besar, sehingga Muharram sebagai mantan panglima kombatan GAM memiliki modal awal yang sangat besar sekaligus sudah memiliki pengikut yang loyal terhadap kepemimpinannya.

“Dari aspek latar belakang syekh muharam sebagai mantan kombatan gam memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pencalonan maupun terpilihnya syekh mharam pada pilkada aceh besar 2024, karena kurang

lebih 80% anggota KPA aceh besar mendukung syeh muharam, dan hal ini dapat dibuktikan dengan perolehan suara syeh muharam dibasis-basis suara PA atau KPA lebih unggul dibandingkan dengan calon lain, bahkan adun mukhlis sekalipun yang memiliki latar belakang yang sama sebagai mantan kombatan GAM masih kalah suara dibandingkan syeh muharam. Hal ini semakin menarik mengingat ketua KPA aceh besar adalah adun mukhlis, perpecahan suara kpa ini dianggap karena para anggota kpa lebih melihat sosok syeh muharam ketika masih aktif sebagai kombatan GAM dan lebih memiliki pengikut jika dibandingkan dengan sepak terjang adun mukhlis ketika masih menjadi kombatan GAM. Perpecahan suara KPA disetiap pemilu sudah menjadi hal yang biasa, sebagai contoh pada pemilu 2019 ada irwandi dan muzakir manaf yang sama-sama mantan kombatan GAM mencalonkan diri sebagai gubernur aceh, tapi anggota KPA lebih memilih irwandi, kemudia di pilkada kabupaten pidie 2019 ketika ada calon bupati abu syik dan sarjani, anggota kpa lebih memilih abu syik dan menang sebagai bupati pidie. Jadi ketokohan dan sepak terjang para tokoh mantan kombatan gam ini masih sangat berpengaruh dikalangan KPA dan dapat menentukan pilihan mereka kepada siapa yang dianggap betul-betul sosok panglima GAM pada masanya” (wawancara ZF).

Berdasarkan penjelasan dari keterangan wawancara tersebut dapat kita pahami bahwa jaringan sosial yang dimiliki Muharram sudah sangat kuat dan mengakar, karena jaringan sosial yang terjadi dalam struktur mantan kombatan GAM Aceh Besar sudah melembaga dalam satu wadah organisasi yang bernama KPA. Dengan latar belakang yang sama secara tidak langsung telah mempengaruhi dukungan masyarakat dengan ketokohnya. Bahkan, Mukhlis Basyah yang juga seorang mantan kombatan GAM dan Ketua KPA Aceh Besar tidak mampu memperoleh suara masyarakat dan anggota kombatan GAM karena masyarakat melihat sejarah ketokohan keduanya dan menilai bahwa Muharram-lah yang lebih memiliki jaringan yang baik dan memiliki citra yang lebih baik ketika memimpin GAM pada masanya. Kemudian menjadi hal yang menarik adalah bagaimana Muharram bisa lebih banyak mendapatkan dukungan dari para mantan kombatan GAM jika dibandingkan dengan Mukhlis Basyah yang saat ini menjabat sebagai ketua KPA. Hal ini dijelaskan dalam wawancara bersama ZF:

“Secara struktur, KPA dan PA itu berbeda dan masing-masing berdiri sendiri, bisa dibilang seluruh mantan kombatan GAM itu tergabung dalam KPA pasca damai, dan hanya Sebagian besar yang bergabung dengan partai Aceh karena PA merupakan representasi dari MoU, ada juga Sebagian bergabung ke PNA dan partai-partai lainnya. Tapi seiring berjalannya waktu, para anggota KPA ini bisa memberikan dukungan kepada siapa saja yang dianggap lebih mewakili dan lebih memiliki pengikut ketika masih aktif sebagai kombatan GAM”

Selain modal jaringan sosial yang berasal dari mantan kombatan GAM, Muharram sebagai calon independen dalam Pemilukada Aceh Besar memiliki

jaringan sosial yang luas dan kuat, yang terdiri dari hubungan dengan masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Terutama hubungan baik antara Muharram dengan para tokoh agama atau para ulama dayah yang ada di Aceh Besar. Sebagaimana pernyataan M dalam wawancara:

“Kalau kita lihat ketokohan di aceh besar kurang lebih sama setiap calon bupati aceh besar yang kemarin. Para mantan kombatan memiliki jaringan yang lebih erat dengan dayah-dayah yang ada di aceh besar atau dengan kata lain mereka lebih dekat dengan ulama dayah dan tidak ada kecenderungan kepada salah satu calon saja, atau bisa kita katakan hampir semua calon itu dekat dengan tokoh ulama dan kalangan dayah. Bahkan musanif yang juga merupakan calon bupati aceh besar asli dari kalangan dayah dan cucu dari ulama dayah Aceh Besar. Tapi, jika melihat tokoh agama yang kharismatik seperti abu ulee titi, beliau cenderung lebih netral atau dalam artian tidak condong kepada syeh muharam atau adun mukhlis ataupun calon-calon lain. Secara langsung, tidak ada calon yang bupati yang mendapatkan dukungan secara terbuka dan terang-terangan dari ulama yang ada di acah besar. Begitupun ketika kampanye tidak ada tokoh agama yang ikut dalam proses kampanye seperti naik ke atas mimbar dan menyerukan mendukung salah-satu pasangan calon”.

### ***Calon Independen dalam Perspektif Norma Sosial pada Kondisi Masyarakat Aceh Besar***

Norma sosial merupakan sekumpulan aturan atau panduan hidup yang berlaku didalam masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis dan dapat mempengaruhi tindakan serta kehidupan sosial masyarakat (Zulfi, 2021). Norma sendiri sangat erat dalam kehidupan masyarakat dan memiliki sifat yang mengikat sehingga norma tersebut wajib ditaati dan menjadi pedoman masyarakat dalam menjalani kehidupan di suatu wilayah. Norma yang berkaitan dengan kondisi serta nilai yang berkembang didalam masyarakat wilayah Aceh Besar, seperti halnya adat dan istiadat yang berlaku sangat kental dan memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai keislaman seperti norma yang berlaku pada masyarakat Aceh umumnya yang sangat kuat, yang menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap masyarakat.

Mayoritas masyarakat Aceh Besar adalah penduduk asli dan hanya sebahagian kecil yang merupakan pendatang. Berdasarkan data kependudukan per 31 Desember 2024, penduduk beragama Islam di Provinsi Aceh sebanyak 5.492.487 jiwa atau sebesar 98,88% (data.acehprov.go.id). factor latar belakang agama islam dan nilai-nilai keislaman menjadi sangat dominan dalam penilaian setiap calon bupati yang bertarung dalam pemilukada di Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Besar. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan dalam wawancara bersama tim sukses salah satu calon bupati Aceh Besar ZF:

“Kalau di Aceh Besar atau Aceh secara keseluruhan in ikan mayoritas penduduknya beragama Islam dan hanya Sebagian kecil saja yang beragama selain islam, sehingga dalam setiap pemilu faktor keagamaan dan program maupun kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan terutama Islam itu sangat besar menjadi penentu masyarakat Aceh

pemilih pemimpinnya. Dan belum ada sejarahnya ada orang bukan islam terpilih dan memimpin di Aceh ini”

Calon Bupati independent yang mencalonkan diri dalam pemilu pada Aceh Besar dinilai memiliki citra yang baik berkat kegiatan maupun kontribusinya kepada masyarakat sejak masa perjuangan sebagai pemimpin kombatan GAM maupun pasca damai. Hal ini disampaikan dalam wawancara bersama ZF yang mengatakan:

“Dalam kegiatan kemasyarakatan, syeh muharam juga lebih dekat dan dikenal melalui kegiatan keagamaan dan syeh Muharam merupakan bagian dari badan kemakmuran masjid di Lhoknga, dengan begitu secara otomatis ketika terlibat dan aktif di BKM, syeh muharam lebih aktif dalam kegiatan sosial masyarakat dan juga terlibat dalam acara-acara besar islam yang dirayakan di wilayah tersebut”.

Selain itu, Syeh Muharam juga memiliki kedekatan dengan kelompok dayah yang sangat identik dengan nilai dan norma keislaman. Sebagaimana penjelasan tokoh Aceh Besar M dalam wawancara:

“Syeh Muharam dan para mantan anggota kombatan GAM umumnya memiliki hubungan dan kedekatan yang baik dengan kalangan dayah. Baik itu santri maupun para pemimpin dayah. Dengan kedekatan dengan ulama dayah itu, orang-orang mungkin terpengaruh dengan citra ulama yang dekat dengan syeh muharam tersebut. Sebagai sosok yang dianggap baik dan memiliki pengaruh dalam masyarakat, kedekatan dengan ulama dayah juga dapat menjadikan syeh muharam dikenal lebih baik dan luas dikalangan dayah”

Berdasarkan penjelasan diatas, maka terlihat bagaimana kondisi masyarakat Aceh yang mayoritas beragama islam dengan peran syeh Muharam dalam kegiatan keagamaan serta terlibat aktif dalam kepengurusan BKM di Lhoknga Aceh Besar menjadi modal pendukung dari segi norma sosial yang ada didalam masyarakat. Syeh Muharam yang sudah aktif dalam kegiatan keagamaan dalam kegiatan sehari-hari sudah lebih dikenal dekat dengan masyarakat dan sejalan dengan norma sosial ke-Acehan yang sangat menjunjung tinggi nilai keislaman. Selain itu pula, faktor kedekatan syeh muharam dengan kalayan dayah serta ulama dayah juga semakin memperkuat bahwa syeh muharam memiliki norma sosial yang sesuai dengan masyarakat Aceh dengan nilai-nilai mendasar untuk menjadi seorang pemimpin yang harus memiliki sifat jujur, dapat dipercaya, dan Amanah, sehingga syeh muharam dapat memenangkan pemilu pada tahun 2024 di kabupaten Aceh Besar.

Keterlibatan Muharram dalam isu-isu lokal yang relevan bagi masyarakat Aceh Besar, terutama kegiatan pembangunan infrastruktur sarana ibadah, dapat meningkatkan modal sosialnya. Dengan menunjukkan kepedulian dan komitmen terhadap isu lokal tersebut, dia dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan pemilih dan meningkatkan kepercayaan pemilih terhadapnya.

***Kepercayaan Kepada Calon Independen Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu pada Aceh Besar***

Kepercayaan merupakan salah satu faktor penting dalam membangun modal sosial dalam hal pemilihan bupati di Aceh Besar. Kepercayaan dinilai menjadi dasar dari modal sosial yang memiliki dampak bagaimana hubungan antara kepercayaan masyarakat terhadap calon independent sehingga masyarakat memilihnya dalam pemilukada di Aceh Besar. Kepercayaan antara calon independen dan masyarakat Aceh sangat tinggi, yang dapat dilihat dari hasil Pemilukada. Calon independen yang memiliki kepercayaan yang tinggi dengan masyarakat dapat memenangkan Pemilukada.

Kepercayaan masyarakat tentunya tidak muncul dengan sendirinya, kepercayaan yang muncul untuk memilih dan mendukung pasangan calon independent dalam pemilukada Aceh Besar juga berasal dari rasa kecewa masyarakat terhadap para pemimpin sebelumnya, sebagaimana penjelasan seorang narasumber dari kalangan masyarakat SI:

“Faktor terpilihnya calon bupati aceh besar pada saat itu ada 4 pasangan, 2 pasangan dinilai sudah memiliki track record memimpin aceh besar yang mana adun mukhlis dari partai aceh atau partai lokal dan mawardi dari partai nasional yang memunculkan kecenderungan dalam masyarakat tidak tertarik lagi dengan calon bupati yang berasal dari partai politik baik partai lokal maupun partai nasional atau dengan kata lain masyarakat sudah kecewa dengan kepemimpinan dua pasangan calon tersebut yang berasal dari partai politik. Dengan demikian, secara pencalonan hanya tinggal 2 pasangan calon, dan ketika masa kampanye ternyata seiring berjalannya proses kampanye masyarakat juga kecewa kepada pasangan musannif dengan janji politiknya yang tidak dapat ditepati hingga menjelang pencoblosan, sehingga berdasarkan kekecewaan masyarakat terhadap calon-calon lain inilah akhirnya kecenderungan masyarakat memilih syeh muharam yang tentunya dengan harapan baru untuk aceh besar”.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka faktor kekecewaan memiliki pengaruh besar terhadap tumbuhnya rasa percaya kepada calon independent. Kekecewaan kepada beberapa calon yang sudah pernah memimpin Aceh Besar mampu dimanfaatkan oleh pasangan calon independent ditambah lagi dengan citra baik yang sudah dibangun oleh calon independent dengan aktif dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, sebagaimana penjelasan SI pada wawancara berikut:

“Syeh muharam dikenal sebagai orang yang banyak membantu masalah yang terjadi di dalam masyarakat, bermacam-macam persoalan mulai dari perselisihan, hingga permasalahan ekonomi yang dialami masyarakat. Didalam masyarakat sendiri syeh muharam juga sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial”

Selain aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, calon independent yang juga merupakan mantan kombatan GAM memiliki kepercayaan dari para mantan anggota GAM di wilayah Aceh Besar. Sebagaimana penjelasan M dalam wawancara berikut:

“Sebagai tokoh yang disegani para mantan kombatan GAM Aceh Besar, syeh muharam cukup berpengaruh karena sering berperan untu menengahi permasalahan atau perselisihan yang terjadi antara para mantan kombatan GAM di dalam tubuh KPA saat ini. Beliau memiliki charisma tersendiri bagi para mantan kombatan dan masih sangat dihormati. ketokohan syeh Muharam di aceh besar tidak sama dengan Adun Mukhlis meskipun sama-sama berlatar GAM. Kalau syeh muharam lebih unggul dalam kepemimpinan ketika masih berjuang bersama GAM dan juga beliau dikenal sebagai panglima untuk wilayah nya pada saat itu, dengan demikian kepemimpinan syeh muharam sudah melekat dengan masyarakat dan para mantan kombatan GAM di Aceh Besar”.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dilihat calon independent disini sudah memiliki modal awal kepercayaan dari kelompoknya sendiri yaitu para mantan kombatan GAM yang semakin memiliki pengaruh. Ketika masyarakat sudah memiliki kepercayaan terhadap seorang tokoh, secara tidak langsung akan menciptakan komunikasi yang baik dan akan memudahkan hubungan antara masyarakat dengan pemimpin yang dipilih.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) di Aceh Besar tahun 2024 telah menjadi momen penting dalam dinamika politik lokal, terutama dengan munculnya calon independen, Muharram Idris dan Syukri, yang berhasil meraih kemenangan meskipun tidak didukung oleh partai politik. Kemenangan ini mencerminkan perubahan signifikan dalam cara masyarakat Aceh memilih pemimpin mereka, yang dipengaruhi oleh kekecewaan terhadap calon-calon yang berasal dari partai politik. Dalam konteks ini, calon independen tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga simbol harapan baru bagi masyarakat yang mendambakan perubahan.

Modal sosial yang dimiliki oleh Muharram Idris sebagai mantan kombatan GAM berperan penting dalam pencalonannya. Jaringan sosial yang telah dibangun selama bertahun-tahun, baik dengan sesama mantan kombatan maupun dengan masyarakat luas, memberikan dukungan yang kuat dalam proses pemilihan. Kepercayaan masyarakat terhadap Muharram, yang dibangun melalui keterlibatannya dalam kegiatan sosial dan keagamaan, juga menjadi faktor kunci dalam memenangkan hati pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan hubungan interpersonal yang kuat dapat menjadi modal utama dalam politik lokal, terutama dalam konteks masyarakat Aceh yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan norma sosial. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya norma sosial dalam menentukan pilihan masyarakat. Dalam masyarakat Aceh Besar yang mayoritas beragama Islam, nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama menjadi pedoman dalam memilih pemimpin. Muharram, dengan citra baik yang dimilikinya, berhasil menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat, terutama melalui keterlibatannya dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Hal ini semakin memperkuat posisinya sebagai calon yang layak dipilih, mengingat masyarakat Aceh sangat menghargai pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai keislaman.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan calon independen dalam Pemilu Aceh Besar tidak hanya ditentukan oleh faktor politik semata, tetapi juga oleh modal sosial, kepercayaan masyarakat, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemenangan Muharram Idris dan Syukri menjadi contoh nyata bagaimana calon independen dapat memanfaatkan jaringan sosial dan kepercayaan masyarakat untuk meraih sukses dalam kontestasi politik, serta menciptakan harapan baru bagi perubahan di tingkat lokal.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Agus. (2013). *Aktor Penyelenggara Pemilu*. Pusat Kajian Inovasi dan Kerjasama Antar Daerah Ilmu Pemerintahan FISIP UB.
- Field, J. (2016). *Modal Sosial (Terjemahan Nurhadi)*. Kreasi Wacana.
- Fukuyama, F. (1999). *The End of History and The Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Penerbit Qalam.
- Khairussalam, K., Zulaikha, S., Isnaeni Nur, R., & Maimunah, S. (2023). Analisis Modal Sosial dalam Kepemimpinan Kepala Desa Sewangi: Studi Kasus Berdasarkan Teori Modal Sosial Putnam. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(2), 909–918. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i2.5280>
- Pratikno. (2007). Calon Independen, Kualitas Pilkada, dan Pelembagaan Parpol. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Volume 10*(Nomor 3).
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*. Princenton University Press.
- Sanit, A. (2009). *Sistem Pemilihan Umum dan Perwakilan Politi , dalam Andy Ramses M, Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.
- Solihah, R. (2019). Modal sosial JejeAdang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015. *Jurnal Wacana Politik*, 4(1).
- Sugiyono. (2003). *Memahami Penelitian Kualitatif*. PT. Alfabeta.
- Thomas Santoso. (2020). *Memahami Modal Sosial*. CV. Saga Jawadwipa.
- Zulfi, F. (2021, July). Norma Sosial: Pengertian, Fungsi, dan Jenis-jenisnya. *Orami*. <https://www.orami.co.id/magazine/norma-sosial>